

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Rismawati¹, Jaelan Usman², Adnan Ma'ruf³

¹) Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh Makassar

²) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

This study aims to explain how the government's role as regulator, motivator and facilitator in flood prevention in the District of Manggala Makassar. The method was used descriptive qualitative. While informants were took from three Governments of Regional Disaster Management Agency of Makassar and seven are citizens of Manggala District. The data is collected by observation, documentation and interview. The results showed that the role of government as a regulator, motivator and facilitator on flood prevention in the District of Manggala Makassar had already been performing well with some efforts that made, such as establish policies, do the coordination and provided facilities in prevention of flood due to the impact of flooding.

Keywords: *the role, government, flood prevention*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan informan diambil dari tiga Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar serta tujuh Warga Kecamatan Manggala. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti menetapkan kebijakan, melakukan koordinasi dan memberikan fasilitas dalam penanggulangan banjir maupun akibat dampak banjir.

Kata kunci: peran, pemerintah, penanggulangan banjir

PENDAHULUAN

Ditinjau dari karakteristik geografis dan geologis wilayah, Indonesia adalah salah satu kawasan rawan bencana banjir. Sekitar 30% dari 500 sungai yang ada di Indonesia melintas wilayah penduduk padat. Lebih dari 220 juta penduduk, sebagian adalah miskin dan tinggal di daerah rawan banjir. Pada umumnya bencana banjir tersebut terjadi di wilayah Indonesia bagian Barat yang menerima curahan hujan lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian Timur. Di Indonesia banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. banjir merupakan ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan dari segi kemanusiaan maupun ekonomi.

Menurut Marlina (2009: 30) Banjir adalah peristiwa dimana terbenamnya daratan oleh air. Hal ini dikarenakan adanya volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan pada suatu tempat akibat

adanya curah hujan lebat, adanya luapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai. Menurut Anwar Kuba (2011: 8) Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah disekitarnya. Banjir adalah situasi dimana suatu daerah sedang digenangi oleh air dalam jumlah yang begitu besar.

Kota Makassar memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan penduduk sebesar kurang lebih 1,4 juta jiwa. Kota Makassar memiliki beberapa kawasan pemukiman penduduk yang rawan terjadi banjir saat puncak musim hujan yang panjang dan musim hujan yang deras. Pemukiman rawan banjir ini sebagian besar di Wilayah Timur Makassar yakni salah satu dari kawasan tersebut adalah Kecamatan Manggala. Kecamatan Manggala merupakan salah satu Kecamatan di Kota Makassar yang memiliki kawasan dataran rendah yang hampir setiap musim hujan yang panjang, rawan terjadi banjir. Banjir yang terjadi di akibatkan karena Wilayah

Kecamatan Manggala memiliki kawasan dataran rendah, luapan air sungai karena air melebihi kapasitas sungai, drainase yang buruk, topografi yang rendah, pengaruh rob, robohnya tanggul, banyaknya rebase dan sedimen yang ada di got, semakin padatnya bangunan yang menyebabkan kurangnya daya resapan air dan air kiriman dari daerah tetangga. Perilaku masyarakat dalam penanganan sampah sangat berperan dalam proses terjadinya drainase yang buruk di Kota Makassar, hal ini terjadi akibat seringnya masyarakat membuang sampah pada selokan dan tidak membuang sampah pada tempatnya.

Melihat masalah tersebut maka perlu adanya peran pemerintah dalam penanggulangan banjir, sebagaimana yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencanaan, pengawasan, dan pengendali dalam mewujudkan

kesejahteraan rakyatnya, dan efektivitas peran pemerintah dapat dilihat dari segi kinerjanya.

Menurut Tuti (2003: 9) Peranan atau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Menurut Soekanto dalam Fatmawati (2010: 8), peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan Menurut Mustafa (2013: 76), pemerintah yaitu merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat.

Menurut Asep Kartiwa, 2012: 162) Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah”, dan yang berasal dari kata perintah. *Dalam bahasa Indonesia*, kata-kata itu berarti: (1) Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu; (2) Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Wilayah, Daerah, dan Negara; (3)

Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.

Menurut Arif (2012) peran pemerintah yaitu: (1) Peranan pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan dalam rangka evektifitas dan tertib adiministrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana; (2) Peranan pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tat kala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan). Sebagai dinamisor, pemerintah berperan melalui

pemberian bimbingan dan pengarahannya yang intensif dan efektivitas kepada instansi dan masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana; (3) Pemerintah sebagai fasilitator yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertip, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ permodalan.

Penanggulangan Bencana di Kota Makassar ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu: (1) Peraturan Walikota Makassar No 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (2) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perda No 3 Tahun 2009 Tentang SKPD Kota Makassar; (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai UU

No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Yaitu: (a) fungsi koordinasi; (b) fungsi komando; (c) fungsi pelaksana.

Menurut Manu (2014) ada beberapa cara untuk penanggulangan bencana banjir: (1) membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik; (2) memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air; (3) berhenti membangun perumahan ditepi sungai, karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai; (4) berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan besar, karena akan menyebabkan bumi ini akan semakin sulit menahan bebannya dan membuat permukaan tanah turun; (5) hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai, karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Sebenarnya menebang pohon tidak dilarang bila kita akan menanam kembali pohon tersebut dan tidak membiarkan hutan menjadi gundul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu tiga bulan dan penelitian ini dilaksanakan di Perumnas Antang Blok VIII Kecamatan Manggala beserta Peran Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar. Alasan penentuan lokasi tersebut karena Perumnas Antang Blok VIII Kecamatan Manggala memiliki daerah dataran rendah dan hampir setiap tahun terjadi banjir. Sedangkan Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, merupakan unit organisasi birokrasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari pemerintah. Jenis penelitiannya adalah wawancara kepada narasumber/informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian dan tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat fenomenologis. Informan merupakan orang-orang yang berpotensi

memberikan informasi tentang permasalahan peran pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar, informan terdiri dari 10 orang, yaitu: 3 dari Pemerintah BPBD Kota Makassar, 1 dari Kecamatan Manggala, 1 dari Kelurahan Manggala, dan 5 dari Warga Perumnas Antang Blok VIII Kecamatan Manggala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulator adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penanggulangan banjir. Kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala. Berdasarkan hasil pernyataan tersebut maka penulis akan memberikan gambaran hasil penelitian penulis mengenai bentuk regulasi/kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Kebijakan yang di terapkan dalam penanggulangan

bencana yaitu Peraturan Walikota Makassar No 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perda No 3 Tahun 2009 Tentang SKPD Kota Makassar, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu: (1) fungsi koordinasi; (2) fungsi komando; (4) fungsi pelaksana.

Sedangkan program kerja yang dilaksanakan dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar yaitu pemerintah telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan banjir seperti Dinas Pemerintah Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan dan Basarnas, Kepolisian, PMI, dan Pemerintah Kecamatan Manggala. adapun program yang dibuat dalam menanggulangi banjir yaitu membuat peta rawan tergenang banjir, pemantauan cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemu-

dian di sampaikan ke Posko BPBD Kota Makassar, normalisasi drainase, pengerukan sedimen yang dilakukan oleh Dinas Pemerintah Umum, perbaikan tanggul, penyiapan sumberdaya untuk tanggap darurat, penyiapan tenaga medis dan paramedis, pendirian posko, pemenuhan kebutuhan dasar dalam penampungan sementara, dan koordinasi dan komando. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah sebagai regulator dalam penanggulangan banjir sudah berjalan dengan baik, karena sudah ada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam penanggulangan banjir dan juga pemerintah melakukan program kerja dalam penanggulangan banjir.

Sejak anggaran tahun 2014 pemerintah berencana membuat kontijensi banjir, dan semua yang terkait dengan bencana banjir, simulasi yang terkait melibatkan masyarakat. Program kerja yang telah dijalankan dalam penanggulangan banjir yaitu perluasan Sungai Kajenjeng, pengerukan sedimen yang dilakukan oleh Dinas Pemerintah Umum, perbaikan tanggul,

pendirian posko yang tetap berjaga selama 24 jam tanpa berhenti dan sekalipun hari libur tetap berjaga di posko dan penyiapan sumber daya tanggap darurat. Kontijensi banjir adalah sesuatu yang belum diketahui kapan terjadinya tetapi pasti akan terjadi. banjir bersifat abstrak yang tidak dapat ditentukan kapan terjadinya maka untuk itu dari hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan banjir mulai dari penetapan kebijakan, menerapkan kebijakan yang ada, membuat kontijensi banjir dan simulasi yang terkait melibatkan masyarakat, melakukan penanggulangan seperti perluasan Sungai Kajenjeng, pengerukan sedimen yang dilakukan oleh Dinas Pemerintah Umum, perbaikan tanggul, pendirian posko.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan Kerjasama dengan pihak-

pihak yang terkait dalam menanggulangi banjir. Banjir yang terjadi tidak dapat dipastikan dengan sempurna karena banjir bersifat abstrak dan sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca yang buruk. Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah disekitarnya. Kecamatan Manggala memiliki daerah dataran rendah yang rawan terjadi banjir apabila terjadi musim hujan yang panjang, maka untuk itu antisipasi pemerintah dalam penanggulangan banjir, yaitu membuat beberapa program kerja seperti: (1) Sejak anggaran tahun 2014 pemerintah berencana membuat kontijensi banjir, dan semua yang terkait dengan bencana banjir, simulasi yang terkait melibatkan masyarakat; (2) Pengerukan sedimen yang dilakukan oleh Dinas PU; (3) Perbaikan tanggul; (4) Pendirian posko yang tetap berjaga selama 24 jam tanpa berhenti dan sekalipu hari libur kami tetap berjaga di Posko; (5) Penyiapan sumber daya tanggap darurat; (6) Penyiapan tenaga medis

dan para-medis; (7) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam penampungan sementara; (8) Koordinasi dan Komando.

Pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektivitas kepada bawahannya dalam penanggulangan banjir dan juga dinas dan instansi yang berkoordinasi dengan Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan banjir dan dampak banjir yaitu pemerintah melakukan bimbingan dan pengarahan dalam penanggulangan banjir seperti sosialisasi dan pelatihan prosedur mengenai penanggulangan banjir, pelatihan pengerahan personil (Tim Reaksi Cepat); memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang terkait dalam mengurangi banjir karena Kecamatan Manggala merupakan daerah dataran rendah yang rawan terjadi banjir dan sering mendapatkan air kiriman dari daerah tetangga seperti Daerah Gowa dan Daerah Maros apabila musim hujan panjang. Pemerintah juga berker-

jasama dengan masyarakat Kecamatan Manggala untuk berpartisipasi dalam penanggulangan banjir demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan hasil pernyataan tersebut maka penulis akan memberikan gambaran hasil penelitian penulis mengenai bagaimana bentuk pengarahannya dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai dinamisor.

Situasi normal atau tidak terjadi bencana, program kegiatan BPBD Kota Makassar lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan, dan kesiapsiagaan. Program dan kegiatan tentunya memerlukan kerjasama dengan pihak yang terkait seperti misalnya kegiatan sosialisasi, diklat dan lain-lain dan akan melibatkan badan/dinas/instansi lain dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar sebagai koordinator pelaksanaannya, kegiatan seperti ini dilakukan sebulan sekali di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Sedangkan dalam situasi darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus

pelaksanaan tanggap darurat. Sedangkan di Kecamatan Manggala selalu dihimbau kepada pihak Kecamatan Manggala agar selalu mengingatkan warganya untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah disembarang tempat dan menjaga kebersihan sungai.

Untuk melakukan pengarahannya Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Dinas Kebersihan serta Dinas Kesehatan, PMI dan Pemerintah Kecamatan Manggala. Setiap saat menghimbau larangan membuang sampah di sembarang tempat dan kegiatan ini dilakukan oleh pihak Kecamatan. Koordinasi yang dilakukan pemerintah dengan instansi lain yang berhubungan dengan penanggulangan banjir maupun akibat dampak banjir yaitu Dinas Pemerintah Umum melakukan pengerukan sedimen, Dinas Kebersihan harus memperhatikan Keadaan Kebersihan Lingkungan dan membuat kebijakan tentang larangan membuang sampah di sembarang tempat, Dinas

Kesehatan dan PMI harus memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban akibat dampak bencana banjir di Kecamatan Manggala seperti perawatan dan memberikan obat-obatan yang dibutuhkan.

Koordinasi yang dilakukan pemerintah dengan badan/dinas/instansi yang berhubungan dengan penanggulangan banjir di adakan pertemuan, dan sosialisasi sekali sebulan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian dilakukan pengarahan kepada setiap bidang dalam penanggulangan banjir. Dinas Pemerintah Umum melakukan pengerukan sedimen, Dinas Kebersihan harus memperhatikan keadaan kebersihan lingkungan dan membuat kebijakan tentang larangan membuang sampah di sembarang tempat, Dinas Kesehatan dan PMI harus memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban akibat dampak bencana banjir di Kecamatan Manggala seperti perawatan dan memberikan obat-obatan yang dibutuhkan. sedangkan warga Kecamatan Manggala juga ikut

berpartisipasi dalam penanggulangan banjir. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dapat dipahami bahwa dalam penanggulangan banjir pemerintah telah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Perhubungan, dinas sosial dan Dinas Kebersihan serta Dinas Kesehatan, PMI dan Pemerintah Kecamatan Manggala. untuk pengarahan diadakan pertemuan secara resmi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah minimal satu kali dalam sebulan. Dalam pertemuan ini dibahas tentang upaya-upaya yang akan dilakukan dalam penanggulangan banjir.

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu pemerintah harus menyediakan fasilitas dalam penanggulangan banjir maupun fasilitas akibat dampak banjir. Bantuan fasilitas dari pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir sangat bermanfaat bagi warga Kecamatan Manggala yang mengalami musibah bencana banjir. Berdasarkan pernyataan tersebut penulis akan memberikan gambaran hasil penelitian penulis mengenai bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam

penanggulangan banjir dan dampak banjir yang terjadi di Kecamatan Manggala. Hasil wawancara dapat dipahami bahwa pemerintah telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan semaksimal mungkin, pemerintah berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya untuk penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala, pemerintah melakukan pengerukan sedimen, pemantauan cuaca dan pendirian posko. sedangkan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat mengenai dampak banjir seperti menyediakan Posko darurat dan petugas Posko melakukan evakuasi genangan banjir, pertolongan dan membuka bidang dapur umum dengan jangka waktu minimal tiga hari dan apabila lewat dari itu kami harus meminta izin untuk perpanjangan waktu kepada Pemerintah Kota. Untuk Posko darurat kami bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, PMI, Dinas Kesehatan, Basarnas dan Polri Polsek. Sedangkan musim penghujan tahun ini di Kecamatan Manggala telah dilakukan evakuasi pada bulan Januari dan di Poskokan untuk

sementara di Mesjid. dengan demikian pemerintah di sarankan untuk lebih meningkatkan kinerjanya sebagai aparat pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Fasilitas dalam penanggulangan banjir seperti pengerukan sedimen, perluasan sungai kajenjeng, mendirikan posko. sedangkan fasilitas yang diberikan akibat dampak banjir yaitu peralatan pengevakuasian korban banjir, pendirian posko sebagai tempat pengungsian sementara, bantuan berupa makana atau nasi bungkus, air mineral, obat-obatan, serta perlengkapan bayi seperti popok dan susu. Sedangkan fasilitas setelah banjir yaitu melakukan pendataan kerusakan fasilitas umum, dan perbaikan fasilitas umum yang rusak seperti jalanan umum, sekolah umum, masjid, dan lain-lainnya.

Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar melakukan bekerjasama dengan Tim Basarnas, Kepolisian dan pihak-pihak yang terkait dalam pengevakuasian warga ke tempat

pengungsian sementara. Di tempat pengungsian sementara pemerintah bekerja sama dengan Tim Kesehatan dan PMI untuk memeriksa korban dan memastikan bahwa korban dalam keadaan baik-baik saja serta memberikan bantuan berupa obat-obatan bagi yang sakit. Di tempat pengungsian juga disediakan dapur umum, makan siap saji, air minum, makanan ringan, dan lain-lainnya. Bantuan seperti ini sangat dibutuhkan oleh warga yang mengalami musibah bencana banjir di Kecamatan Manggala.

Dapat dipahami bahwa pemerintah sebagai fasilitator telah memberikan fasilitas dalam penanggulangan banjir berupa perluasan sungai kajenjeng, pengerukan sedimen, penjagaan tanggul, pemantauan cuaca, pendirian posko. Sedangkan fasilitas yang diberikan pemerintah pada dampak bencana banjir berupa penjaminan mutuh dan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum seperti menyediakan posko darurat dan petugas posko melakukan evakuasi genangan banjir,

pertolongan dan membuka Bidang Dapur Umum dengan jangka waktu minimal tiga hari dan apabila lewat dari itu maka harus ada perpanjangan waktu dari Pemerintah Kota. Sedangkan musim penghujan tahun ini di Kecamatan Manggala telah dilakukan evakuasi pada bulan Januari dan di poskakan untuk sementara di Mesjid.

Fasilitas adalah suatu sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan banjir maupun akibat dampak banjir. Maka dari itu pemerintah sebagai fasilitator telah memberikan fasilitas dalam penanggulangan banjir seperti pengerukan sedimen, penjagaan tanggul, pemantauan cuaca, pendirian posko. Sedangkan fasilitas yang diberikan akibat dampak bencana banjir yaitu alat-alat pengevakuasian korban banjir, penjaminan mutuh dan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; seperti menyediakan Posko darurat dan petugas posko melakukan evakuasi genangan banjir, pertolongan dan membuka bidang dapur umum dengan jangka

waktu minimal tiga hari dan apabila lewat dari itu kami harus meminta izin untuk perpanjangan waktu kepada Pemerintah Kota. Sedangkan musim penghujan tahun ini di Kecamatan Manggala, telah dilakukan evakuasi pada bulan Januari dan di poskakan untuk sementara di Masjid. Fasilitas yang diberikan setelah banjir yaitu melakukan pendataan kerusakan fasilitas umum, dan perbaikan fasilitas umum yang rusak seperti jalanan umum, sekolah umum, masjid, dan lain-lainnya.

Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah terlaksana dengan baik dengan berbagai upaya yang telah dilakukan. Sebelum terjadi bencana banjir pemerintah melakukan penanggulangan banjir seperti normalisasi sungai kajenjeng, pengerukan drainase, pemantauan cuaca, penjagaan tanggul. Sedangkan fasilitas akibat dampak banjir pemerintah memberikan penjaminan mutu dan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum seperti menyediakan posko darurat dan

petugas posko melakukan evakuasi genangan banjir, pertolongan dan membuka Bidang Dapur Umum dengan jangka waktu minimal tiga hari dan apabila dari itu maka harus ada perpanjangan waktu dari Pemerintah Kota Makassar. Untuk posko darurat Badan Penanggulangan Bencana daerah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, PMI, Dinas Kesehatan, Basarnas dan Polsek.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik dengan melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan banjir seperti menetapkan kebijakan dalam penanggulangan banjir, melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan dinas dan instansi yang terkait dengan penanggulangan banjir, serta memberikan fasilitas, baik dalam penanggulangan banjir maupun akibat dampak banjir yang terjadi di

Kecamatan Manggala Kota Makassar. Meskipun masih terjadi banjir ketika musim hujan yang panjang namun pemerintah sudah berusaha melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan semaksimal mungkin. Bencana banjir memang tidak mudah untuk ditanggulangi karena banjir bersifat abstrak tetapi setidaknya pemerintah telah berusaha untuk mengurangi banjir yang ada dan kejadian ini sudah terlihat berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Untuk penanggulangan banjir dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Warga Kecamatan Manggala Kota Makassar demi tercapainya tujuan bersama dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif. 2012. Peran dan Fungsi Pemerintah. [www.http://arigfii](http://arigfii). Diakses 01 Agustus 2014.
- Fatmawati, Fajrin. 2010. *Peranan Pemerintah dalam Pelayanan Public (Pelayanan Distribusi Raskin) Dikelurahan Bonto Tangnga Kecamatan Tamalate Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kartiwa, Asep. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kuba Anwar. 2011. *Rangkuman Kuliah Manajemen Bencana*. Rangkuman Kuliah. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalanrea Makassar.
- Manu. 2014. Indonesia. [www.http://www.Manulife.com/2014/Indonesia](http://www.Manulife.com/2014/Indonesia). Diakses 13 Agustus 2014.
- Marlina, Lina. dkk. 2011. *Buku Pintar Bencana Alam*. Jakarta: Harmoni.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: ALFABETA.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*.
- Peraturan Daerah. *Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perda No 3 Tahun 2009 Tentang SKPD Kota Makassar*.
- Peraturan Walikota. *Peraturan Walikota Makassar No 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*.
- Verawati, Tuti A. 2003. *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Skripsi. Makassar: Universitas '45 Makassar